

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2016– 2021, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja organisasi, dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahan penyempurnaan pilihan – pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2018, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
- b. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{realisasi/target} \times 100\%$$

- c. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Nilai Angka	Kategori
> 85 s/d 100	Memuaskan
> 75 s/d 85	Sangat Baik
> 64 s/d 75	Baik
> 50 s/d 65	Cukup Baik
> 30 s/d 50	Agak Kurang
> 0 s/d 30	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1. berikut ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target, Realisasi dan Capaiannya Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS . INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
			Tercapai	Tidak Tercapai
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional				
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	on process		on process
Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%	9,06%	110,37	
Persentase SKPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	100%	on process		on process
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat.				
Persentase realisasi pajak daerah	95%	110,84%	116,67	
Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel				
Tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga	100%	100%	100	
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	70%	87,71%	125,30	

Dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu standar yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi :

1. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;
2. penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kota Sibolga;
3. penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
4. penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Target Tahun 2018, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset).

Namun pada realisasinya, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 **belum ada karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih dalam proses penyelesaian.**

Pemerintah Kota Sibolga telah membuat kebijakan dalam rangka mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain :

- a. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Sibolga Nomor 900/04 / 2010 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 4);
- b. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual;
- c. Sebagai salah satu indikator akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah adalah kualitas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang memenuhi prinsip-prinsip wajar, tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Maka dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 yang berbasis akrual, kredibel, tepat waktu dan sesuai SAP, maka dilaksanakan pelaporan pada antar periode pelaksanaan tahun

anggaran yang dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Dan dapat juga digunakan sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat disajikan secara wajar.

- d. Penerapan aplikasi baik untuk pengelolaan keuangan daerah melalui SIMDA Keuangan maupun pengelolaan aset daerah (melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
- e. Peningkatan SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual.

2. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target adalah toleransi kemampuan untuk membelanjakan sesuai dengan anggaran yang ditargetkan.

Deviasi ini merupakan Sisa Lebih Anggaran dari jumlah anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam APBD Tahun anggaran yang berkenaan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target adalah:

$$\text{Toleransi deviasi penyerapan keuangan} = 100\% - \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{target belanja}} \times 100\%$$

Adapun data realisasi belanja di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Data realisasi belanja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Program, Rencana dan Realisasinya Tahun 2018

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		
		RENCANA	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji dan Tunjangan	2.677.661.741,00	2.638.607.368,00	98,54%
2	Tambahan Penghasilan PNS	3.027.480.000,00	2.183.510.000,00	72,12%
3	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	501.116.716,00	472.078.715,00	94,21%
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	257.141.876,00	203.972.290,00	79,32%
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG		6.463.400.333,00	5.498.168.373,00	85,07%
BELANJA LANGSUNG				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.618.196.935,00	10.309.841.275,00	97,10%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.750.174.000,00	2.504.389.190,00	91,06%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	131.050.000,00	129.648.000,00	98,93%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	400.000.000,00	388.431.700,00	97,11%
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	8.547.300.200	7.460.269.500	87,28%
TOTAL BELANJA LANGSUNG		22.446.721.135,00	20.792.579.665,00	92,63%
TOTAL BELANJA		28.910.121.468,00	26.290.748.038,00	90,94%

Sehingga perhitungan toleransi deviasi penyerapan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah:

$$\text{Toleransi deviasi penyerapan keuangan} = 100\% - \frac{26.290.748.038}{28.910.121.468} \times 100\%$$

$$\text{Toleransi deviasi penyerapan keuangan} = 100\% - 90,94\%$$

$$= 9,06\%$$

Target indikator ini sebesar 9,06% menunjukkan bahwa deviasi penyerapan anggaran kurang dari 10% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Sibolga karena semakin kecil toleransi deviasi penyerapan anggaran semakin baiklah penyerapan anggaran keuangan yang ditetapkan. Capaian target indikator ini sendiri sebesar 110,37%.

3. Persentase SKPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Untuk Persentase SKPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua belum bisa diuraikan persentase pencapaiannya karena penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2018 masih dalam proses penyelesaian.

Adapun rumus untuk menghitung realisasi Persentase SKPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua adalah:

$$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{SKPD yang sudah menerapkan LK berbasis akrual}}{\text{Jumlah SKPD di Pemko Sibolga}} \times 100\%$$

Capaian target indikator ini adalah 100%, dimana ditargetkan pada tahun anggaran 2018 seluruh SKPD di Pemko Sibolga (30 SKPD) sudah melakukan penerapan laporan keuangan berbasis akrual.

4. Persentase realisasi pajak daerah

Adapun persentase realisasi pajak daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Data realisasi pajak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Rencana dan Realisasi, Persentasi Capaian Tahun 2018

No	Hasil Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi Capaian
1	Pajak Hotel	379.294.000,00	426.523.744,00	112,45%
2	Pajak Restoran	1.049.500.000,00	1.819.159.908,00	173,34%
3	Pajak Hiburan	97.835.000,00	102.315.000,00	104,58%
4	Pajak Reklame	390.000.000,00	487.090.611,00	124,90%
5	Pajak Penerangan Jalan	4.787.665.191,00	4.910.724.995,00	102,57%
6	Pajak Parkir	45.000.000,00	47.377.500,00	105,28%
7	Pajak PBB-P2	2.323.040.120,00	2.077.343.918,00	89,42%
8	Pajak BPHTB	950.000.000,00	1.238.661.230,00	130,39%
Total Hasil Pajak Daerah		10.022.334.311,00	11.109.196.906,00	110,84%

Realisasi Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018 adalah sebesar Rp11.109.196.906,00 atau 110,84% dari nilai anggaran sebesar Rp10.022.334.311,00

Adapun rumus untuk menghitung realisasi pajak daerah adalah:

$$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Persentase} = \frac{11.109.196.906,00}{10.022.334.311,00} \times 100\%$$

$$= 110,84\%$$

Capaian target indikator ini adalah 100%, dimana ditargetkan persentase realisasi pajak adalah 95% dan yang terealisasi adalah sebesar 116,67%

5. Tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga

Capaian tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga adalah 100% dari target 100%.

Semua SKPD (30 SKPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pengelola aset daerah Pemerintah Kota Sibolga telah membuat Kartu Inventaris Barang dengan rinci dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun rumus untuk menghitung realisasi tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga adalah:

$$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{Jumlah tersedianya KIB SKPD}}{\text{Jumlah SKPD di Pemko Sibolga}} \times 100\%$$

Maka capaian realisasi nya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Persentase} &= \frac{30 \text{ KIB}}{30 \text{ SKPD}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%}\end{aligned}$$

Capaian target indikator ini mencapai 100%, dari ditargetkan 30 SKPD terealisasi 30 SKPD.

6. Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat

Target Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat tahun 2018 adalah penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Sibolga sebanyak 5 bidang.

Capaian target indikator ini mencapai 87,72%, dari ditargetkan 5 bidang terealisasi 4 bidang.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat tahun 2018 adalah:

$$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{Luas bidang tanah yang berhasil disertifikatkan}}{\text{Target luas bidang tanah yang disertifikatkan}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan persentase capaian indikator adalah sebagai berikut:

Jumlah bidang lahan yang menjadi target penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Sibolga adalah sebagai berikut;

Tabel 3.4

Data Target Rencana Tanah Milik Pemerintah Kota Sibolga yang Bersertifikat Tahun Anggaran 2018

No	Letak/Alamat	Kelurahan	Luas
1	Mela I (D/H Mela)	Mela I (D/H Mela)	120.290 m ²
2	Jl. Oswald Siahaan	Sibolga Ilir	7.089 m ²
3	Jl. Sisingamangaraja	Pancuran Gerobak	2.535 m ²
4	Jl. Sisingamangaraja	Pancuran Gerobak	2.712 m ²
5	Jl. Jendral Sudirman. Desa Bonan Dolok	Sitahuis, Tapanuli Tengah	18.572 m ²
TOTAL			151.198 m²

Adapun realisasi tanah Pemerintah Kota Sibolga yang telah bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Data Realisasi Tanah Milik Pemerintah Kota Sibolga yang Bersertifikat Tahun Anggaran 2018

No	Letak/Alamat	Sertifikat				Luas
		No. Seri	Tahun	Hak	NIB	
1	Mela I (D/H Mela)	AAB71546 02.14.07.07.4.00009	2018	Pakai	02.14.03.13.00036	120.290 m ²
2	Jl. Oswald Siahaan	AAB748519 02.13.01.01.4.00041	2018	Pakai	02.13.01.01.00656	7.089 m ²
3	Jl.Sisingamangaraja	AAB748557 02.13.02.04.4.00069	2018	Pakai	02.13.02.04.00645	2.535 m ²
4	Jl.Sisingamangaraja	AAB748558 02.13.02.04.4.00070	2018	Pakai	02.13.02.04.00646	2.712 m ²
TOTAL						132.626 m²

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat tahun 2018 adalah:

$$\text{Capaian Persentase} = \frac{\text{Luas bidang tanah yang berhasil disertifikatkan}}{\text{Target luas bidang tanah yang disertifikatkan}} \times 100\%$$

Sehingga

$$\begin{aligned}\text{Capaian Persentase} &= \frac{132.626 \text{ m2}}{151.198 \text{ m2}} \\ &= 87,71\%\end{aligned}$$

Capaian target indikator ini mencapai 87,71% dari ditargetkan 5 bidang terealisasi 4 bidang.

Pengukuran pencapaian sasaran dari program-program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat tabel berikut;

Tabel 3.6
Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah

NO	Sasaran	Skala Pengukuran						Ket
		M	SB	B	CB	AK	K	
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	-	-	-	-	-	On process
2	Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	√	-	-	-	-	-	-
3	Persentase SKPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	-	-	-	-	-	-	On process
4	Persentase realisasi pajak daerah	√	-	-	-	-	-	-
5	Tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga	√	-	-	-	-	-	-
6	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	√	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

M = Memuaskan

SB = Sangat Baik

B = Baik

CB = Cukup Baik

AK = Agak Kurang

K = Kurang

Dari uraian diatas, tergambarkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama tersebut, secara umum berhasil dicapai 4 (empat) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, dan 2 (dua) indikator masih dalam proses penyelesaian dengan sasaran pencapaian kinerja sasaran memiliki nilai rata-rata 113,08% dengan kategori **MEMUASKAN**.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah baik dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Sementara pengukuran capaian kinerja tahun akumulasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja tahun Akumulasi Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

SASARAN STRATEGIS . INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016		2017		2018		2019
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional							
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	TMP	WTP	WDP	WTP	on process	WTP
Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%	14,76%	10%	16,66%	10%	9,06%	10%
Persentase SKPD yang Melakukan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	100%	100%	100%	100%	100%	on process	-
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Meningkat.							
Persentase realisasi pajak daerah	95%	96,66%	95%	105,88%	95%	110,84%	95%
Terciptanya Pengelolaan Aset yang transparan dan akuntabel							
Tersedianya Kartu Inventaris Barang pada SKPD dan Pemerintah Kota Sibolga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Sibolga yang bersertifikat	60%	100%	70%	100%	70%	87,71%	70%

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah(BPKPAD) mengalami beberapa kendala. Berikut permasalahan yang dihadapi BPKPAD beserta strategi pemecahan masalah yang menghambat kinerja dan pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah sehingga BPKPAD melakukan monitoring pembayaran pajak setiap bulannya untuk memenuhi target peningkatan PAD dari pajak daerah.
2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak daerah maka BPKPAD melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memasang himbauan-himbauan tentang tarif pajak daerah agar penerimaan PAD dari sektor pajak daerah lebih optimal.
3. Terlambatnya penyampaian laporan realisasi PAD ke Pemerintah Pusat dapat diatasi dengan menyurati OPD agar menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Laporan PAD dapat disajikan tepat waktu dan DAU tidak tertunda.
4. Implementasi Aplikasi E-budgeting belum dapat digunakan karena data e-planning dan e-budgeting belum bersinergi maka BPKPAD mengharapkan kerja sama Bappeda dalam hal ini agar dapat menyediakan data PPAS APBD (pra RKA).
5. Penyampaian Laporan Aset dari OPD tidak tepat waktu hal ini disebabkan OPD terlambat memberikan laporan aset yang sebagian besar kendalanya dikarenakan kurangnya koordinasi pengurus barang OPD dengan bendahara pengeluaran OPD sehingga BPKPAD menghimbau pengurus barang OPD agar lebih serius mengerjakan laporan aset dan meningkatkan kerja sama dengan bendahara agar laporan aset lebih baik, efisien, dan tepat waktu.
6. Ada tanah menjadi sengketa/tidak dapat ditelusuri disebabkan banyak tanah yang tidak digunakan yang tercatat di OPD pengguna barang maka dari itu diharapkan bagi OPD agar barang/aset yang tidak digunakan OPD diserahkan kepada pengelola barang dan OPD diharapkan lebih peduli atas aset yang dikuasainya sehingga seluruh tanah di Pemko Sibolga sudah bermanfaat dan dikuasai.
7. Masih banyak aset tetap yang masih dikuasai oleh ASN yang sudah mutasi dan pensiun sehingga diperlukan surat pernyataan dan daftar aset yang digunakan ASN sehingga tidak ada lagi barang yang hilang/tidak ditemukan.

8. Terlambatnya penyampaian laporan dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi antar bidang agar dalam penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pelaporan kinerja dan laporan keuangan lebih efektif dan efisien.
9. Meningkatkan SDM aparatur BPKPAD dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan latihan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pengiriman untuk mengikuti sosialisasi peraturan dan perundang undangan serta perlu bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk melaksanakan studi banding ke kota kota lain yang lebih maju Pengelolaan Keuangan Asset Daerah dan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, sebagai salah satu Instansi Pemerintah Kota Sibolga bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Data Rencana dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG				
I	Gaji dan Tunjangan	2.677.661.741,00	2.638.607.368,00	98,54%
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.074.060.420,00	2.046.430.968,00	98,67%
	Tunjangan Keluarga	198.491.814,00	190.876.372,00	96,16%
	Tunjangan Jabatan	190.167.175,00	189.970.000,00	99,90%
	Tunjangan Fungsional Umum	86.405.150,00	86.315.000,00	99,90%
	Tunjangan Beras	124.061.616,00	123.910.620,00	99,88%
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.434.345,00	1.072.129,00	24,18%
	Pembulatan Gaji	41.221,00	32.279,00	78,31%
II	Tambahan Penghasilan PNS	3.027.480.000,00	2.183.510.000,00	72,12%
	Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	3.027.480.000,00	2.183.510.000,00	72,12%
III	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	501.116.716,00	472.078.715,00	94,21%

	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	501.116.716,00	472.078.715,00	94,21%
IV	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	257.141.876,00	203.972.290,00	79,32%
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	257.141.876,00	203.972.290,00	79,32%
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.463.400.333,00	5.498.168.373,00	85,07%
BELANJA LANGSUNG				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.618.196.935,00	10.309.841.275,00	97,10%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000,00	8.240.000,00	99,88%
	Hasil/outcome			
	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai dengan terpenuhinya kebutuhan terhadap materai dan benda-benda ps lainnya untuk jasa transaksi keuangan			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	9.270.016.935,00	8.993.597.448,00	97,02%
	Hasil/outcome			
	Terpenuhinya jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan komunikasi pada OPD selama satu tahun			
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.000.000,00	24.711.500,00	98,85%
	Hasil/outcome			
	Terjaganya kebersihan kantor yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi			
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	113.273.500,00	94,39%
	Hasil/outcome			
	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional/rutin pada OPD			
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	23.873.900,00	79,58%
	Hasil/outcome			
	Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan berbagai blanko pajak, blanko SP2D dan dokumen-dokumen yang lain sesuai kebutuhan OPD			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.500.000,00	26.077.000,00	98,40%
	Hasil/outcome			
	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik untuk keperluan OPD			
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	21.110.000,00	87,96%
	Hasil/outcome			
	Tersedianya koran, majalah dan buku-buku peraturan perundangan yang menjadi sumber referensi dan informasi			
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.330.000,00	21.178.000,00	72,21%
	Hasil/outcome			
	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan rapat-rapat internal pada dinas dan juga untuk pengadaan makanan dan minuman tamu OPD.			
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	475.000.000,00	474.879.927,00	99,97%

Hasil/outcome				
Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka mengikuti rapat dinas, koordinasi maupun konsultasi.				
10	Penyediaan Jasa Non PNS	604.800.000,00	597.600.000,00	98,81%
Hasil/outcome				
Tersedianya tenaga administrasi / non PNS untuk mendukung kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.				
11	Penyusunan dan Penyimpanan Arsip/Dokumen	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Tertatanya dokumen-dokumen arsip dan terjaganya keamanan dan kemudahan pengambilan berkas.				
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.750.174.000,00	2.504.389.190,00	91,06%
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.500.000,00	24.819.000,00	97,33%
Hasil/outcome				
Tersedianya peralatan gedung kantor dan meningkatnya fasilitas, kenyamanan dan keindahan kantor				
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	69.350.000,00	67.707.000,00	97,63%
Hasil/outcome				
Terpenuhinya peralatan gedung kantor dan meningkatnya fasilitas-fasilitas peralatan kantor yang masih kurang				
3	Pengadaan Meubeleur	17.500.000,00	16.115.000,00	92,09%
Hasil/outcome				
Terpenuhinya meubeleur gedung kantor dan meningkat/mengganti meubeleur kantor yang rusak dan masih kurang				
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	83.800.000,00	83.503.000,00	99,65%
Hasil/outcome				
Gedung kantor terpelihara sehingga tetap layak untuk dipergunakan secara wajar sesuai fungsinya				
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	153.024.000,00	101.967.690,00	66,64%
Hasil/outcome				
Kendaraan dinas/operasional terpelihara sehingga tetap layak untuk dipergunakan secara wajar sesuai fungsinya dan menjaga kondisi mesin dan bahan bakar agar tetap bisa dipakai				
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	48.000.000,00	32.539.500,00	67,79%
Hasil/outcome				
Perlengkapan gedung kantor terpelihara sehingga tetap layak untuk dipergunakan secara wajar sesuai fungsinya				
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	140.000.000,00	36.740.000,00	26,24%
Hasil/outcome				
Peralatan gedung kantor terpelihara sehingga tetap layak untuk dipergunakan secara wajar sesuai fungsinya				
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	13.000.000,00	3.939.500,00	30,30%

Hasil/outcome				
Meubeleur kantor terpelihara sehingga tetap layak untuk dipergunakan secara wajar sesuai fungsinya				
9	Pengadaan Tanah	2.200.000.000,00	2.137.058.500,00	97,14%
Hasil/outcome				
Tersedianya Tanah				
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	131.050.000,00	129.648.000,00	98,93%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	69.950.000,00	65.506.000,00	99.33%
Hasil/outcomes Meningkatnya disiplin aparatur				
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	65.100.00,00	64.142.000,00	98,53%
Hasil/Outcomes Meningkatnya disiplin aparatur				
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	400.000.000,00	388.431.700,00	97,11%
1	Pendidikan/Pelatihan dan Kursus Keterampilan	400.000.000,00	388.431.700,00	97,11%
Hasil/outcome				
Peningkatan kualitas SDM dalam upaya peningkatan kinerja personil yang ada.				
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	8.547.300.200	7.460.269.500	87,28%
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	516.750.000,00	513.400.000,00	99,35%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku PERDA tentang pertanggungjawaban yang sudah diundangkan				
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	80.000.000,00	74.070.000,00	92,59%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku PERWAL pertanggungjawaban APBD yang sudah ditandatangani				
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	157.000.000,00	134.522.500,00	85,68%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku PERDA tentang perubahan APBD yang sudah diundangkan				
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	313.890.200,00	301.605.000,00	96,09%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku PERWAL tentang perubahan APBD yang sudah diundangkan				

5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.417.500.000,00	1.325.426.250,00	93,50%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku PERDA tentang APBD yang sudah diundangkan				
6	Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD	376.620.000,00	220.632.500,00	58,58%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku PERWAL tentang APBD TA yang sudah diundangkan				
7	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	111.570.000,00	106.292.500,00	95,27%
Hasil/outcome				
Meningkatnya Pendapatan Daerah				
8	Pengkodean Barang Milik Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Tersedianya Barang Milik Daerah yang sudah terdaftar				
9	Penyusunan Pelaporan Barang/Aset Daerah Semester II	52.520.000,00	51.650.000,00	98,34%
Hasil/outcome				
Tersajinya Laporan Barang/Aset Daerah Semester II				
10	Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan Berikutnya	52.000.000,00	49.220.000,00	94,65%
Hasil/outcome				
Tersajinya Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan Berikutnya				
11	Penghapusan Barang Milik Daerah	312.480.000,00	250.610.000,00	80,20%
Hasil/outcome				
Tersedianya data barang yang bisa digunakan dan yang sudah rusak				
12	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang kepada Penyimpan/Pengurus Barang	46.410.000,00	42.670.000,00	91,94%
Hasil/outcome				
SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan kepada Penyimpan/Pengurus Barang				
13	Monitoring dan Pembinaan Verifikasi Keuangan	34.640.000,00	34.640.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Meningkatnya penyelesaian laporan SPJ SKPD				
14	Penyelesaian sengketa/pengalihan aset pemerintah kota	625.010.000,00	463.631.150,00	74,18%
Hasil/outcome				
Terciptanya sertifikasi tanah Pemko				
15	Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB)	164.570.000,00	163.005.000,00	99,05%

Hasil/outcome				
Tersedianya Buku Kartu Inventaris Barang (KIB)				
16	Penyusunan laporan triwulan realisasi APBD	20.000.000,00	19.180.000,00	95,90%
Hasil/outcome				
Tersedianya Laporan Triwulan Realisasi APBD				
17	Penertiban/Apel Kendaraan Dinas	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Terciptanya buku data kendaraan dinas				
18	Penyusunan Buku Pengadaan Barang Pemerintah Kota Sibolga	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Tersedianya Buku Pengadaan Barang Pemerintah Kota Sibolga				
19	Penyusunan Standar Biaya	173.000.000,00	158.207.000,00	91,45%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku standar biaya				
20	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Terciptanya buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Buku Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)				
21	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD)	6.440.000,00	6.440.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Terciptanya buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan buku Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD)				
22	Verifikasi Anggaran Kas dan Perubahan Anggaran Kas	343.200.000,00	171.912.500,00	50,09%
Hasil/outcome				
Tersedia dan tersusunnya anggaran kas OPD				
23	Pengelolaan PBB-P2 Kota Sibolga	175.300.000,00	162.315.000,00	92,59%
Hasil/outcome				
Peningkatan pendapatan PBB-P2				
24	Monitoring Pemeriksaan Kartu Inventaris Ruang (KIR)	8.500.000,00	7.290.000,00	85,76%
Hasil/outcome				
Terwujudnya pemeriksaan Kartu Inventaris Ruang (KIR) yang akurat				
25	Sosialisasi Permendagri Tentang Penyusunan APBD	52.250.000,00	43.415.000,00	83,09%

Hasil/outcome				
Meningkatnya pemahaman tentang pedoman penyusunan APBD				
26	Pengelolaan Cash Management System (CMS)	119.500.000,00	119.500.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Terkelolanya sistem Cash Management System (CMS) secara terpadu				
27	Pembuatan Pedoman Penyusunan APBD dan P.APBD	42.500.000,00	39.073.500,00	91,94%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku pedoman penyusunan APBD dan P. APBD				
28	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	229.360.000,00	217.932.400,00	95,02%
Hasil/outcome				
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah				
29	Evaluasi Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.340.000,00	6.337.000,00	99,95%
Hasil/outcome				
Meningkatnya penyelesaian penyusunan laporan PAD				
30	Evaluasi Laporan PBB-P2	7.060.000,00	7.054.000,00	99,92%
Hasil/outcome				
Meningkatnya penyelesaian penyampaian Laporan PBB-P2				
31	Penyusunan Buku Persediaan Barang Pakai Habis Semester I	5.400.000,00	-	0,00%
Hasil/outcome				
Tersedianya Buku Persediaan Barang Pakai Habis Semester I				
32	Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah	641.750.000,00	556.530.000,00	86,72%
Hasil/Outcome				
Meningkatnya keakuratan pencatatan aset daerah				
33	Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame	27.500.000,00	25.482.000,00	92,66%
Hasil/outcome				
Tersedianya data wajib pajak terbaru dalam meningkatkan PAD				
34	Penyusunan Buku Pemakai Barang Milik Daerah	13.200.000,00	12.170.000,00	92,20%
Hasil/outcome				
Tersedianya Buku Pemakai Barang Milik Daerah				
35	Penyusunan Buku Kartu Inventaris Ruang (KIR)	44.170.000,00	41.977.000,00	95,04%
Hasil/outcome				
Tersedianya Buku Inventaris Ruang (KIR)				

36	Monitoring atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Sibolga	17.360.000,00	16.543.000,00	95,29%
Hasil/outcome				
Meningkatnya keakuratan data Wajib Pajak PBB-P2				
37	Penyusunan Informasi Keuangan Daerah	195.900.000,00	184.705.000,00	94,29%
Hasil/outcome				
Tersedianya data keuangan daerah yang terintegrasi dengan rekap data				
38	Sosialisasi pajak hotel dan restoran kepada bendahara pengeluaran SKPD	10.350.000,00	10.325.000,00	99,76%
Hasil/outcome				
Meningkatnya pengetahuan bendaharawan terkait pajak hotel dan restoran				
39	Evaluasi Permohonan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi BPHTB Kota Sibolga	17.360.000,00	16.409.500,00	94,52%
Hasil/outcome				
Meningkatkan keakuratan data wajib pajak				
40	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	86.400.000,00	83.690.000,00	96,86%
Hasil/outcome				
Tersedianya buku perwal tentang perubahan APBD				
41	Penerbitan dan Penatausahaan Surat Penyediaan Dana (SPD)	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Tersedianya SPD OPD sebagai dasar pencairan dana setiap triwulannya				
42	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	85.410.000,00	85.202.200,00	99,76%
Hasil/outcome				
Tertibnya administrasi pengelola keuangan daerah				
43	Penyusunan Buku Persediaan Barang Pakai Habis Semester II	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Terciptanya buku persediaan barang pakai habis semester II				
44	Pengelolaan dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2	50.100.000,00	50.051.000,00	99,90%
Hasil/outcome				
Tersedianya dan terdistribusinya SPPT PBB-P2				
45	Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Kota Sibolga	131.000.000,00	130.333.900,00	99,49%
Hasil/outcome				
Tersedianya data gaji PNSD yang akurat, sebagai wujud dari akuntabilitas pelayanan				
46	Penyusunan Laporan Kas Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00%
Hasil/outcome				

Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah				
47	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Sibolga	80.000.000,00	67.910.000,00	84,89%
Hasil/outcome				
Terwujudnya penerapan aplikasi SIMDA keuangan				
48	Penertiban Pajak Reklame	26.700.000,00	25.341.600,00	94,91%
Hasil/outcome				
Terlaksananya pembayaran pajak reklame				
49	Pemutakhiran Data Objek PBB-P2 Khusus Tanah Kosong di Kota Sibolga	16.500.000,00	14.954.000,00	90,63%
Hasil/outcome				
Meningkatkan keakuratan data objek PBB-P2				
50	Pendampingan Implementasi SIMDA Pendapatan pada Pemerintah Kota Sibolga	50.700.000,00	16.786.000,00	33,11%
Hasil/outcome				
Terselenggaranya pendampingan BPKP pada implementasi SIMDA pendapatan				
51	Pendampingan Implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Sibolga	255.420.000,00	172.152.000,00	67,40%
Hasil/outcome				
Terlaksananya pendampingan BPKP pada implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Sibolga				
52	Monitoring Penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame pada Wajib Pajak	39.650.000,00	37.288.500,00	94,04%
Hasil/outcome				
Terlaksananya penyetoran pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame tepat waktu				
53	Penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Pemerintah Kota Sibolga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Tersedianya Perwal tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik pemerintah Kota Sibolga				
54	Bimbingan Teknis Perencanaan Aset	53.220.000,00	51.526.000,00	96,82%
Hasil/outcome				
Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam hal perencanaan aset				
55	Monitoring karcis	11.600.000,00	11.337.000,00	97,73%
Hasil/outcome				
Terlaksananya Monitoring Karcis				
56	Penyusunan Laporan Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai	38.300.000,00	34.460.500,00	89,98%

Hasil/outcome				
Tersedianya Laporan Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai				
57	Upgrading dan Koordinasi Aplikasi dan Operator SIM Perbendaharaan	39.390.000,00	18.280.000,00	46,41%
Hasil/Outcome				
Terlaksananya Upgrading dan Koordinasi Aplikasi dan Operator SIM Perbendaharaan				
58	Pengembangan aplikasi E-budgeting	804.665.000,00	750.429.000,00	93,26%
Hasil/Outcome				
Terlaksananya pengembangan aplikasi E- budgeting				
59	Rekonsiliasi dan penyusunan kertas kerja penyajian asset OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
Hasil/outcome				
Terlaksananya rekon dan tersedianya penyajian aset SKPD				
60	Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	118.920.000,00	115.267.000	96,93%
Hasil/Outcome				
Terlaksananya Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)				
61	Pembuatan Perwal Hibah dan Bansos	25.375.000,00	24.538.000	96,70%
Hasil/Outcome				
Terbitnya Perwal Hibah dan Bansos				
TOTAL BELANJA LANGSUNG		22.446.721.135,00	20.792.579.665,00	92,63%
TOTAL BELANJA		28.910.121.468,00	26.290.748.038,00	90,94%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bagi pihak-pihak yang berkepentingan stakeholder. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagai mana diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan;
2. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama tersebut, secara umum berhasil dicapai 4 (empat) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, dan 2 (dua) indikator masih dalam proses penyelesaian;
3. Sasaran pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga tahun 2018 memiliki nilai rata-rata **113,08** dengan kategori **MEMUASKAN**;
4. Perlunya peningkatan pelatihan Pendidikan di bidang Pengelola Keuangan Daerah untuk meningkatkan sumber daya aparatur;
5. Perlunya upaya yang terus menerus untuk mengkaji dan mengembangkan sumber - sumber Penerimaan PAD sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata.
6. Perlunya peningkatan manajemen aset agar penatausahaan aset semakin baik dan akurat.

Demikian Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 semoga dapat mencapai sasaran dan bermanfaat.

Sibolga, Februari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,**



Drs. SOFYAN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650510 199303 1 004